

Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada SKPD Kabupaten Majalengka)

TITO MARTA SUGEMA DASUKI¹; YUNAR YUDAWATI²

Universitas Majalengka

1. Raya K H Abdul Halim No.103, Majalengka KulonJawa Barat 45418

E-mail : titodasuki@gmail.com (korespondensi)

Submit : 2021-12-08

Review : 2021-1-07

Publish : 2022-01-26

Abstract: Financial statements are a form of accountability, given the importance of the information contained in financial statements, financial statements must be prepared according to applicable accounting standards so that fraud does not occur. One of the acts of accounting fraud that results in inefficient budget abuse is budget wastage. So the purpose of this study is to determine the effect of internal control, compensation suitability and compliance with accounting rules on the tendency of accounting fraud in SKPD Majalengka Regency. The method used in this research is to use descriptive analysis and verification techniques. The population in this study were SKPD Majalengka Regency employees, amounting to 70 people. The sample in this study used the total sampling method or saturated sample, so that the entire population was sampled. The type of data used is primary data obtained from questionnaires distributed to all samples. The analytical tools used in this research are classical assumption test, multiple linear regression analysis, coefficient of determination analysis, and hypothesis testing. The results of this study indicate that partially internal control has a significant effect on the tendency of accounting fraud in the Majalengka Regency SKPD, the suitability of compensation has a significant effect on the tendency of accounting fraud in the Majalengka Regency SKPD, and obedience to accounting rules has a significant effect on the tendency of accounting fraud in the Majalengka Regency SKPD.

Keywords: *Internal Control, Compensation Appropriateness, Compliance with Accounting Rules, Trends in Accounting Fraud.*

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Prinsip dasar dalam penyelenggaraan *good corporate governance* yaitu akuntabilitas. Untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* diperlukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkualitas dan berkompeten dibidangnya. SKPD merupakan instansi pemerintah daerah yang menerima dan menggunakan anggaran untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Seiring berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terjadi perubahan sebutan atau istilah, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). OPD mempunyai

kewajiban untuk membuat akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Dewi, 2017). Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah kepada masyarakat mengenai aktivitas keuangan di institusi pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Informasi yang tersedia dalam laporan keuangan sangat penting karena dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan sebagai bahan

pertimbangan dalam menetapkan rencana kegiatan untuk periode selanjutnya. Mengingat pentingnya informasi yang ada dalam laporan keuangan, maka laporan keuangan harus disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku agar tidak terjadi kecurangan.

Kecurangan secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Orang awam seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa fraud sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi. Penegakan hukum merupakan bentuk tindakan nyata oleh subjek hukum kepada hukum yang berlaku yaitu dengan menaati hukum yang ada di suatu negara. Kebanyakan masyarakat mengerti tentang hukum, tetapi tidak mematuinya. Jadi dalam hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan timbul bila penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya. Penegakan hukum yang baik diharapkan dapat mengurangi fraud di sektor pemerintahan (Zulkarnain, 2013). Kecurangan akuntansi atau yang sering disebut dengan fraud akhir-akhir ini banyak terjadi di Indonesia, hal ini juga menjadi pusat perhatian bagi berbagai media baik dalam negeri maupun mancanegara (Shintadevi, 2015). Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA) telah diindikasikan sebagai bentuk dari Tindakan dan kebijakan yang disengaja dengan tujuan penipuan atau memanipulasi sehingga merugikan pihak lain. Kecurangan akuntansi yang terjadi salah satu yaitu munculnya tindak pidana korupsi. Kecenderungan akuntansi pada dasarnya merupakan upaya yang disengaja untuk menggunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadi. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah satu yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah satu atau

penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan.

Indonesia termasuk negara yang memiliki tingkat korupsi tertinggi di dunia yaitu Indonesia berada di posisi 85 dari 180 negara. (*Transparency International, 2020*), sedangkan hasil *Failed States Index*, Indonesia masuk ke dalam peringkat ketiga negara yang masuk dalam kategori mengkhawatirkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi di negara Indonesia belum banyak perubahan ke arah yang lebih baik walaupun saat ini posisi Indonesia naik dua poin dari tahun 2018. Di Indonesia kecurangan akuntansi dibuktikan dengan adanya likuidasi beberapa bank, diajukannya manajemen BUMN dan swasta ke pengadilan, kasus kejahatan perbankan, manipulasi pajak, korupsi di komisi penyelenggaraan pemilu, dan DPRD.

Fenomena kecurangan yang terjadi saat ini yaitu dimana Provinsi Jawa Barat selama 7 tahun secara berturut-turut dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan 24 dari 27 lembaga pemerintah daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat, di antaranya telah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan adapun pemerintah daerah yang mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Meskipun demikian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang berdampak adanya potensi kerugian negara. Maka hal ini terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan.

Tiga daerah di Jawa Barat yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018. Ketiga daerah tersebut yakni

Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung Barat. Menurut Ketua Tim Kehumasan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jabar, Hary Sutrasno, dari hasil audit BPK ada sejumlah masalah yang menyebabkan tiga daerah tersebut gagal meraih wajar tanpa pengecualian (WTP), seperti Cianjur tidak dapat diberikan WTP karena ada fraud (kecurangan), Kabupaten Tasikmalaya ditemukan masalah potongan bantuan sosial (dana hibah) hingga 90 persen, sedangkan Bandung Barat terkendala penggelapan dana BPJS di sebuah rumah sakit. Website (Kompas.com, 2019).

Kecurangan akuntansi menimbulkan dampak dan konsekuensi. Kecurangan akuntansi biasanya dipicu oleh pemerintahan yang ingin laporan keuangan terlihat baik. Kecenderungan kecurangan dipengaruhi oleh ada atau tidaknya kesempatan (*Opportunity*) atau peluang. Peluang yang besar membuat kecenderungan kecurangan terjadi. Untuk menangani masalah tersebut, diperlukan monitoring yang baik. Selain dari sisi peluang, kecenderungan kecurangan terjadi dipengaruhi oleh besar tidaknya tekanan. Tekanan (*Pressure*) yaitu motivasi dari individu untuk bertindak curang yang disebabkan oleh adanya tekanan keuangan maupun non keuangan, serta dapat disebabkan pula oleh tekanan pribadi maupun tekanan non pribadi. Kecurangan (*fraud*) yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh kecurangan yang sebenarnya terjadi. Seperti menangani penyakit, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kecurangan dapat dikurangi bahkan dicegah dengan menciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu satu sama lain. Karena itu, upaya utama seharusnya adalah pada pencegahannya. Upaya mencegah kecurangan dimulai dari pengendalian internal yang efektif (Wilopo, 2012). Pengendalian internal merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan

berpengaruh bagi instansi pemerintahan. Pengendalian internal adalah representative dari keseluruhan kegiatan di dalam organisasi yang harus dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum (Tunggal, 2011).

Pengendalian internal merupakan Tindakan atau aktivitas yang dilakukan manajemen untuk memastikan (secara memadai, bukan mutlak) tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Adanya pengendalian internal yang efektif, memungkinkan terjadinya pengecekan silang (*cross check*) terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain. Hal ini menurunkan peluang terjadinya kecenderungan kecurangan dan mengalokasikan kesalahan.

Pemberian kompensasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Kompensasi merupakan penghargaan atau imbalan secara langsung maupun tidak langsung. Financial maupun non-financial, yang adil dan layak kepada karyawan, sebagai balasan atau kontribusi atas jasanya terhadap pencapaian tujuan perusahaan menurut Marwansyah (2016 : 269). Sedangkan Menurut Hasibuan (2017 : 119) Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Pembentukan sistem kompensasi yang efektif merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia karena membantu menarik dan mempertahankan pekerjaan-pekerjaan yang berbakat. Selain itu sistem kompensasi perusahaan memiliki dampak terhadap kinerja strategis. Biasanya karyawan akan melakukan tindakan kecurangan karena

ketidakpuasan atau kekecewaan dengan hasil atau kompensasi yang telah mereka terima atas apa yang telah dikerjakan. Salah satu akibat yang fatal dari ketidaksesuaian kompensasi adalah kecurangan akuntansi.

Selain kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi, ketaatan aturan akuntansi PP RI No. 24 tahun 2005 dalam Thoyibatun (2009) menyebutkan bahwa standar akuntansi keuangan adalah aturan yang digunakan dalam kegiatan akuntansi, sedangkan ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian pelaksanaan prosedur akuntansi, penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya, dan prosedur pengelolaan asset organisasi, dengan aturan yang telah ditentukan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Setiap manajemen perusahaan seharusnya penerapan aturan akuntansi pada entitas nya masing-masing karena publik memerlukan kapabilitas kebenaran dari suatu informasi.

Ketaatan aturan akuntansi bisa dikatakan semua kewajiban dalam organisasi untuk memenuhi segala ketaatan aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dalam pembuatan laporan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan efektif, andal serta akurat informasinya.

Terkait faktor-faktor kecurangan yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan, beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya. Diantaranya penelitian yang dilakukan Chindy Kurnia R.D (2017) meneliti tentang pengaruh pengendalian internal, kesesuaian kompensasi ketaatan aturan akuntansi, dan Perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan objek penelitian pada SKPD Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengendalian internal, kesesuaian kompensasi perusahaan, kepatuhan aturan akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan

kecurangan akuntansi, sedangkan tidak etis perilaku berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan menurut Devy Ervina Indriastuti dkk (2016) yang melakukan penelitian analisis pengaruh asimetri informasi, pengendalian internal, persepsi kesesuaian kompensasi, moralitas individu, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengendalian internal, persepsi kesesuaian kompensasi, moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan, hal ini dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan akuntansi secara efektif, asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan yang berarti meningkatkan peluang terjadinya kecurangan. Sedangkan ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi disebabkan belum adanya reward dan punishment pengelola akuntansi terhadap implementasi aturan yang ditetapkan.

Adapun fenomena yang terjadi, kinerja pemerintah menjadi sorotan bagi masyarakat khususnya dalam pengelolaan dana infrastruktur. Permasalahan yang terjadi yaitu penyalahgunaan Anggaran pemerintah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka pada Tahun 2017. Kasus tersebut terungkap berkat adanya Laporan Pengaduan yang dibuat oleh lembaga MATA (Majalengka Transparansi). Laporan ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tertanggal, 27 Mei 2019 dan Tanda Terima Surat tertanggal 31 Mei 2019. Atas hal tersebut, dan setelah melakukan serangkaian Analisa dan Dugaan Masalah yaitu dugaan pemborosan Anggaran akibat pengelolaan anggaran yang tidak efisien, berdasarkan asumsi efisiensi berkisar sebesar 20%, maka besaran anggaran yang diduga sebagai pemborosan anggaran secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 430.000.000,00. Namun demikian dalam

praktik di lapangan sesungguhnya efisiensi anggaran dapat dilakukan hingga berkisar 37%. Dengan demikian potensi pemborosan yang berdampak pada kerugian negara yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka berkesan rasional, maka patut diduga semua Kegiatan Dinas Kesehatan tersebut terdapat pembuatan SPJ (nota-nota dan kwitansi) fiktif. (Indofakta, 2020).

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih focus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian perlu di batasi variabelnya, oleh sebab itu penulis membatasi hanya berkaitan dengan “Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Majalengka)”. Kecenderungan kecurangan dipilih karena perilaku kecurangan akan berdampak besar bagi kemajuan suatu instansi pemerintahan ataupun perusahaan.

Pradyani (2014) teori atribusi menjelaskan bahwa tindakan seorang pemimpin maupun orang-orang yang diberikan wewenang dipengaruhi oleh atribut penyebab. Fritz Heidi (1958) berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dan kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar seperti kesulitan atau

keberuntungan dalam pekerjaan. Hubungan Teori Atribusi dengan variabel pada penelitian ini dimana teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan atau sebab perilakunya yang dipengaruhi oleh kekuatan internal dan eksternal yang akan mencerminkan perilaku kepemimpinan seseorang.

Teori Atribusi tidak terlepas dari perilaku seseorang di dalam organisasi yaitu perilaku pemimpin dan perilaku bawahan. Kepemimpinan seperti

cara berfikir, berperasaan, bertindak, bersikap, dan berperilaku dalam pekerjaan di sebuah organisasi dengan bawahannya. Tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemimpin atau orang tang memberikan wewenang disebabkan oleh atribut penyebab. Termasuk tindakan kecurangan akuntansi.

Pengendalian Internal

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2014:127) bahwa pengertian pengendalian internal adalah: “Dirancang, diimplementasikan dan dipelihara oleh TCWG, manajemen dan karyawan lain untuk menangani risiko bisnis dan risiko kecurangan yang diketahui (*identified business and fraud risk*) mengancam pencapaian tujuan entitas, seperti pelaporan keuangan yang andal. Pengendalian selalu merupakan jawaban (*response*) untuk menangkal (*mitigate*) suatu ancaman (kemungkinan terjadinya risiko). Pengendalian yang tidak merupakan jawaban untuk menangkal ancaman, adalah kesia-siaan (*redundant*).”

Sementara itu dalam PP No. 8 Tahun 2006 dijelaskan bahwa: “Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.”, indikator pengendalian internal adalah sebagai berikut : Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Informasi Sistem, Kegiatan Pengendalian, dan Pemantauan.

Kesesuaian Kompensasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesesuaian adalah perihal sesuai, keselarasan atau kecocokan. Kesesuaian merupakan suatu keadaan mesra cocok atau pas terhadap sesuatu yang didapatkan. Kesesuaian di

sini mengacu pada tingkat kepuasan karyawan dalam instansi.

Menurut Hasibuan (2017:119) Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Pembentukan sistem kompensasi yang efektif merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia karena membantu menarik dan mempertahankan pekerjaan-pekerjaan yang berbakat. Selain itu sistem kompensasi perusahaan memiliki dampak terhadap kinerja strategis. Dengan demikian kesesuaian kompensasi adalah kecocokan dan kepuasan karyawan/pegawai/pekerja atas apa yang diberikan oleh instansi kepada karyawan baik berupa uang ataupun barang. Dan dengan adanya kesesuaian kompensasi diharapkan dapat mencegah dan meminimalisasikan Tindakan kecurangan di dalam instansi. Indikator kesesuaian kompensasi yaitu sebagai berikut : gaji, upah, insentif, tunjangan dan fasilitas.

Ketaatan Aturan Akuntansi

Menurut Rahmawati (2012) bahwa aturan merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Aturan akuntansi disebut demikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan ketaatan aturan akuntansi PP RI No. 24 tahun 2005 dalam Thoyibatun (2009) menyebutkan bahwa standar akuntansi keuangan adalah aturan yang digunakan dalam kegiatan akuntansi, sedangkan ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian pelaksanaan prosedur akuntansi, penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya, dan prosedur pengelolaan asset organisasi, dengan aturan yang telah ditentukan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan- aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang

dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bahwa: Dengan demikian Ketaatan Aturan Akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi segala ketentuan atau aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan efektif, andal serta akurat informasinya. Indikator ketaatan aturan akuntansi terdiri dari : persyaratan pengungkapan, menyajikan informasi, objektif, kehati-hatian, konsistensi penyajian.

METODE

Menurut Sugiyono (2017:136), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan uraian diatas, populasi dalam penelitian ini adalah 27 Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Majalengka.

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel jenuh. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini 81 orang yaitu kepala SKPD, kepala bagian keuangan dan pegawai bagian keuangan pada SKPD di Kabupaten Majalengka.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, kemudian data kualitatif tersebut di kuantitatifkan dengan menghitung hasil skor kuesioner dengan skala likert.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan alat analisis software SPSS versi 21. Metode regresi dalam penelitian ini dapat dirumuskan persamaannya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b1X1 + b2X2 + b3X3 + \epsilon$$

Sumber : (Sugiyono, 2014:275)

Keterangan:

Y= Variabel dependen X1= Variabel
Independen X2= Variabel Independen
X3= Variabel Independen a= Konstanta
b= Koefisien regresi independen
 ε = Faktor Kesalahan.

HASIL

Berdasarkan hasil uji validitas semua variabel menunjukkan bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikansi 5% yaitu sebesar 0.235. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid. Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada masing-masing variabel menunjukkan nilai Cronbach Alpha yaitu lebih besar dari 0.60. Hal ini menyatakan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid. Berdasarkan hasil uji normalitas diatas melalui aplikasi SPSS versi 21, diketahui besarnya nilai KolmogorovSmirnov adalah 0,876 dengan tingkat signifikansi yaitu 0,426 atau lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diatas melalui aplikasi SPSS versi 21, diketahui bahwa nilai tolerance dari variabel Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Ketaatan Aturan Akuntansi lebih besar dari 0,10 sedangkan nilai VIF dari semua variabel kurang dari 10. sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan aplikasi SPSS versi 21, diketahui bahwa dari grafik scatterplot terlihat titik-titik menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi melalui Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi dan Ketaatan Aturan Akuntansi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil dari tabel di atas, maka persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 44,071 - 0,554 (X1) - 0,420 (X2) -$$

$$0,468 (X3) + \varepsilon$$

Analisis Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Internal (X1) memiliki kontribusi sebesar 67,24%, Kesesuaian Kompensasi (X2) memiliki kontribusi sebesar 68,89%, dan Ketaatan Aturan Akuntansi (X3) memiliki kontribusi sebesar 64%.

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan table diatas bahwa dapat di jelaskan hasil pengujian parsial untuk masing-masing variabel independent sebagai berikut:

1. Pengendalian Internal (X1). Hasil analisis uji t untuk variabel Pengendalian Internal (X1) diperoleh nilai thitung sebesar 3,178 $>$ ttabel sebesar 1,996, maka H_0 ditolak dan H_a diterima serta nilai signifikan $0,002 < 0,05$, artinya Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kecenderungan kecurangan Akuntansi
2. Kesesuaian Kompensasi (X2). Hasil analisis uji t untuk variabel Pengendalian Internal (X1) diperoleh nilai thitung sebesar 2,609 $>$ ttabel sebesar 1,996, maka H_0 ditolak dan H_a diterima serta nilai signifikan $0,011 < 0,05$, artinya Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kecenderungan kecurangan Akuntansi
3. Ketaatan Aturan Akuntansi (X3). Hasil analisis uji t untuk variabel Pengendalian Internal (X1) diperoleh nilai thitung sebesar 2,703 $>$ ttabel sebesar 1,996, maka H_0 ditolak dan H_a diterima serta nilai signifikan $0,009 < 0,05$, artinya Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kecenderungan kecurangan Akuntansi

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil pengujian X1, diperoleh nilai pada variabel Pengendalian Internal sebesar 0,554 dengan arah koefisien negatif. Artinya, semakin efektif dan semakin baik pengendalian internal pada suatu instansi, maka semakin rendah pula kecenderungan kecurangan akuntansi. terjadi pada suatu instansi. Pengendalian internal merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan berpengaruh bagi instansi pemerintahan. Pengendalian internal merupakan representative dari keseluruhan kegiatan di dalam organisasi yang harus dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum

Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil pengujian X2, diperoleh nilai pada variabel kesesuaian kompensasi sebesar 0,420 dengan arah koefisien negatif. Artinya, Ketika semakin tinggi kesesuaian kompensasi yang diberikan pada pegawai, maka semakin rendah pula kecenderungan kecurangan akuntansi terjadi. Begitu pula sebaliknya semakin rendah kompensasi yang diberikan semakin tinggi pula tingkat kecurangan yang dilakukan. Kesesuaian kompensasi merupakan pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Pembentukan sistem kompensasi yang efektif merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia karena membantu menarik dan

mempertahankan pekerjaan-pekerjaan yang berbakat. Selain itu sistem kompensasi perusahaan memiliki dampak terhadap kinerja strategis. Biasanya karyawan akan melakukan tindakan kecurangan karena ketidakpuasan atau kekecewaan dengan hasil atau kompensasi yang telah mereka terima atas apa yang telah dikerjakan. Salah satu akibat yang fatal dari ketidaksesuaian kompensasi adalah kecurangan akuntansi.

Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil pengujian X3, diperoleh nilai pada variabel ketaatan aturan akuntansi sebesar 0,468 dengan arah koefisien negatif. Artinya, Ketika semakin taat individu atau kelompok di dalam suatu instansi terhadap aturan akuntansi yang telah di tetapkan pada peraturan pemerintah maka tingkat kecurangan akuntansi yang terjadi akan berkurang. Dimana ketaatan aturan akuntansi merupakan kewajiban dalam organisasi karena jika laporan keuangan dibuat tidak mengikuti aturan akuntansi dapat menyebabkan peluang terjadinya perilaku tidak etis serta kecurangan akuntansi. Ketaatan aturan akuntansi bisa dikatakan semua kewajiban dalam organisasi untuk memenuhi segala ketaatan aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dalam pembuatan laporan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan efektif, andal serta akurat informasinya.

SIMPULAN

Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya semakin efektif dan semakin baik pengendalian internal, maka semakin rendahnya kecurangan akuntansi terjadi. Kesesuaian Kompensasi berpengaruh signifikan

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya semakin tinggi kompensasi yang diberikan, maka semakin rendah pula kecurangan akuntansi yang terjadi. Ketaatan Aturan Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya semakin taat SKPD terhadap aturan akuntansi yang telah ditetapkan pemerintah maka semakin berkurang pula kecurangan yang terjadi.

DAFTAR RUJUKAN

- ACFE. (2002). *Fraud Examiners Manual, Third Edition*. New York
- Devy Ervina Indriastuti dkk (2016) *Analisis Pengaruh Asimetri Informasi, Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Individu, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecurangan Akuntansi*. Jurnal InFestasi. Vol. 12, No.2, Hal. 115 -130
- Hasibuan, Melayu S.P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kajari Benarkan Tangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Kesehatan Majalengka Tahun 2017 (2020). Diambil dari http://www.indofakta.com/news_21534.html Pada tanggal 19 Januari 2021
- Kurnia, Chindy Rahma Dewi. (2017). "Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi". JOM Fekon, Vol. 4 No.1
- Marwansyah. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Dua. Cetakan keempat. Bandung: Alfabeta,CV
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Rahmawati, Ardiana Peri. (2012). *Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Shintadevi, Prekanida Farizqa. (2015). "Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening pada Universitas Negeri Yogyakarta" (skripsi). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Siti Thoyibatun. (2009). *Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Serta Akibatnya terhadap Kinerja Organisasi*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan volume 16 nomer 2:245-260
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta. Bandung
- Theodorus M Tuanakkota. (2014). *Auditing Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Selemba Empat.
- Tiga Daerah di Jabar Gagal Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

- 40 Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada SKPD Kabupaten Majalengka)
(TITO MARTA SUGEMA DASUKI¹; YUNAR YUDAWATI²)

(2019). Diambil dari
<https://regional.kompas.com/read/2019/06/21/12351061/tiga-daerah-di-jabar-gagal-raih-opini-wajar-tanpa-pengecualian>. Pada tanggal 4 November 2020)

Tunggal. A.W(2011). *Teori dan Kasus Internal Auditing*. Jakarta: Harvarindo